



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: III
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Rapat ke	: 20
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Menteri Kesehatan RI
Hari/Tanggal	: Senin, 15 Februari 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Meminta laporan dan penjelasan Kementerian Kesehatan RI terhadap beberapa isu spesifik; a. Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD; b. Penyebaran virus Zika; dan c. Jual-beli organ tubuh manusia. 2. Meminta Laporan dan penjelasan Kementerian Kesehatan RI terhadap realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015; 3. Meminta laporan dan penjelasan Kementerian Kesehatan RI mengenai evaluasi dan pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015; 4. Membahas rencana Kementerian Kesehatan RI dalam mewujudkan Kemandirian obat nasional.
Ketua Rapat	: Dede Yusuf M.E, S.T.,M.I.Pol/Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara 1, Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. 34 orang dari 49 Anggota Komisi IX DPR RI. B. Menteri Kesehatan RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan RI dibuka pada pukul 10.25 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib DPR RI Pasal 251 ayat (1) dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan program/kegiatan dalam APBN tahun 2016 sehingga realisasi anggaran dapat lebih baik dibanding tahun 2015.
2. Komisi IX DPR RI menyayangkan tidak terserapnya tambahan anggaran untuk PBI tahun 2015 sebesar Rp. 398 Milyar, untuk itu Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Sosial RI.
3. Untuk penanggulangan penyebaran virus zika dan KLB DBD, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan vaksin dengue dengan melibatkan berbagai lembaga penelitian dan perguruan tinggi;
 - b. Memperluas cakupan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terkait DBD dan zika dengan melibatkan anggota Komisi IX DPR RI;
 - c. Bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melayani pasien DBD dengan baik dan lebih memberdayakan masyarakat, kader posyandu serta petugas pemantau jentik (Jumantik).
4. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan untuk segera menyelesaikan RPP tentang Transplantasi Organ, Jaringan dan Sel sebagaimana diamanatkan oleh UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk membuat *roadmap* kemandirian obat nasional dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat akan ketersediaan, keterjangkauan dan ketepatan obat.
6. Mengingatkan kembali akan hasil kesimpulan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan pada tanggal 2 Desember 2015 bahwa Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk mengawal proses pengangkatan tenaga kesehatan PTT menjadi CPNS di tahun 2016, sehingga prosesnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk memberikan:
 - a. Rincian realisasi jenis belanja dan kegiatan/program dalam APBN Tahun Anggaran 2015 per unit kerja;
 - b. Rincian anggaran terkait penempatan bidan PTT tahun 2016;

c. Jawaban secara tertulis atas pertanyaan anggota pada Rapat Kerja hari ini, selambat-lambatnya pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2016.

Rapat diakhiri pukul 14.10 WIB

Menteri Kesehatan RI,



Prof. Dr. dr. NILA DJuwITA F. MOELOEK, Sp.M (K)

**Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,**



DEDE YUSUF M.E., S.T., M.I. Pol
A-415